

**PENGARUH PENGAWASAN MELEKAT, PENGAWASAN FUNGSIONAL,
PENGAWASAN PREVENTIF, PENGAWASAN DETEKTIF DAN
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP
EFEKTIFITAS PENGENDALIAN ANGGARAN
(Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Indragiri Hilir)**

**Oleh :
Tri Desi Arini
Pembimbing : Edfan Darlis dan Lila Anggraini**

Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : tridesiarini@yahoo.co.id

ABSTRACT

the research aims to examine The Influence of supervision attached, monitoring functional, preventive supervision, detective supervision and performance-based budgeting to the effectiveness of budgetary control. Object of this research is department of the city government in Indragiri Hilir. There are sixty four which are sent but, only sixty questionnaires returned. The variables were examined are Influence of supervision attached, monitoring functional, preventive supervision, detective supervision and performance-based budgeting to the effectiveness of budgetary control. The results of this research showed that supervision attached has an effect on effectiveness of budgetary control with 0,031 significance, the monitoring functional has an effect on effectiveness of budgetary control with 0,19 significance, preventive supervision has an effect on effectiveness of budgetary control with 0,017 significance, detective supervision has an effect on effectiveness of budgetary control with 0,14 significance, and performance-based budgeting has no effect on effectiveness of budgetary control with 0,65 significance. The results of this research also showed that coefficient determinant is 92,8%. Each independent variables, gives the strong influence to dependent variable, it means independents variables could explain dependent variable well.

Keywords: attached, monitoring functional, preventive, detective and performance-based budgeting to the effectiveness of budgetary control

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pengawasan dengan menekankan pada pentingnya peranan atasan atau pimpinan disebut sebagai pengawasan melekat. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap

bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Revisond dalam Uci, 2012).

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal, maupun dari lingkungan eksternal pemerintahan. Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan itu, berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Revrisond dalam Uci, 2012).

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa apakah pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan atau masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Pengawasan merupakan bagian dari pengendalian, adanya kelemahan pada pengawasan akan menghasilkan pelaksanaan dari realisasi anggaran yang tidak optimal. Pengawasan itu sendiri bertujuan untuk menjaga agar rencana itu dalam realisasinya tetap terarah pada tujuan yang telah ditentukan. Maka dari itu diperlukannya peningkatan pengendalian dan pengawasan dalam setiap penyaluran kegiatan.

Selain pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan preventif dan pengawasan detektif, penganggaran berbasis kinerja juga dapat berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Bastian (2010:191) menjelaskan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada 'output' organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategi organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan

perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

Berdasarkan pengertian anggaran berbasis kinerja menurut Bastian, komponen visi, misi dan rencana strategis merupakan bagian inti dari anggaran berbasis kinerja. Untuk dapat melakukan pengendalian kinerja tersebut tentunya target kinerja yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dapat ditentukan dengan jelas dalam anggaran. Maka dari itu, model penganggaran berbasis kinerja yang dalam penyusunan anggarannya didasarkan pada kejelasan target kinerja seharusnya dapat digunakan sebagai alat pengendalian kinerja disamping juga sebagai alat pengendalian anggaran. Hal ini disebabkan adanya kejelasan indikator kinerja yang akan memudahkan dalam pengendalian target kinerja yang telah ditetapkan dalam anggaran serta.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah pengawasan melekat berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran? 2) Apakah pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran? 3) Apakah pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran? 4) Apakah pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran? 5) Apakah penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1)

Pengaruh pengawasan melekat terhadap efektifitas pengendalian anggaran. 2) Pengaruh pengawasan fungsional terhadap efektifitas pengendalian anggaran. 3) Pengaruh pengawasan preventif terhadap efektifitas pengendalian anggaran. 4) Pengaruh pengawasan detektif terhadap efektifitas pengendalian anggaran. 5) Pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

TELAAH PUSTAKA

Efektifitas Pengendalian Anggaran

Dengan berlakunya otonomi daerah dan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik, itu artinya semakin tinggi tuntutan untuk meningkatkan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran daerah. Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota Kabupaten wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan keuangan pemerintah. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008).

Anggaran menyediakan hubungan penting antara

perencanaan dan pengendalian. Peran perencanaan dinyatakan dalam bentuk input yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas yang direncanakan. Peran pengendalian dilakukan dengan mempersiapkan anggaran dengan suatu cara yang memperlihatkan secara jelas masukan dan sumber daya yang dialokasikan kepada individu atau departemen untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Pengendalian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang dianggarkan dengan hasil yang diperoleh untuk menjamin bahwa tingkat pengeluaran tidak dilampaui atau tingkat aktivitas yang direncanakan tercapai. Efektifitas pengendalian merupakan tujuan yang ingin dicapai dari fungsi anggaran sebagai alat pengendali (Kenis dalam Mardiasmo, 2009). Mardiasmo (2009:134) mengatakan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, efektifitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan.

Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat tidak sama dengan pengawasan atasan langsung, walaupun pelaksanaan pengawasan melekat merupakan tanggung jawab seseorang atasan atau pimpinan, namun dalam melaksanakan tanggung jawab kepengawasannya, seseorang atasan atau pimpinan tidak dapat hanya bergantung pada kehadiran dirin ya sendiri. Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan tugas kepengawasannya itu, tidak bisa tidak seseorang atasan atau pimpinan suatu instansi, dituntut

untuk mengembangkan suatu sistem pengawasan tertentu. Sistem pengawasan yang antara lain dapat dikembangkan melalui penataan organisasi, penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi kinerja dan pemberian insentif itulah yang biasanya disebut sebagai sistem pengendalian manajemen. Menurut Revrisond (dalam Uci, 2012) pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendali yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan melekat merupakan salah satu syarat bagi keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik. Keberhasilan waskat ini pada akhirnya akan menyebabkan waskat itu sendiri tumbuh menjadi perilaku yang melekat dalam tata kerja pemerintahan, dan berkembang menjadi budaya atau kultur baru aparatur pemerintahan.

Pengawasan Fungsional

Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik berasal dari lingkungan internal, maupun dari lingkungan eksternal pemerintahan. Pelaksanaan

pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan itu, berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintahan maupun ekstern pemerintahan, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggungjawab. Sebagai unsur penunjang, pelaksanaan pengawasan fungsional bersifat mutlak. Di satu pihak, keberadaannya memang didasarkan atas amanat Undang-undang Dasar, sedangkan di pihak lain, tanpa kehadiran pengawasan fungsional, mustahil pengawasan melekat dapat berfungsi secara efektif.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa keberadaan pengawasan fungsional pada dasarnya sama pentingnya dengan pengawasan melekat. Bila pengawasan melekat menitikberatkan perhatian pada peranan pimpinan dan pada pengembangan sistem pengawasan secara internal, maka pengawasan fungsional mendukung pelaksanaan pengawasan melekat melalui pembentukan lembaga-lembaga fungsional pengawasan.

Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif sangat diperlukan karena dapat menghentikan timbulnya permasalahan. Para pendesain sistem harus menekankan pengendalian mereka pada pengawasan preventif adalah lebih ekonomis dan lebih baik bagi hubungan antara manusia untuk mencegah suatu permasalahan sebelum timbul dari pada mendeteksi dan mengoreksi permasalahan setelah terjadi. Pengawasan preventif meliputi standar, desain formulir, formulir-formulir yang dinomori (dinomori terlebih dahulu secara tercetak), dokumentasi, kata-kata sandi, konsistensi operasi.

Menurut Sopanah (dalam Uci, 2012) pengawasan dapat dilakukan berupa pengawasan langsung maupun tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri ke tempat pekerjaan serta meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui preaudit yaitu sebelum pekerjaan dimulai.

Pengawasan Detektif

Arif (2013) mengatakan bahwa pengawasan detektif menyiagakan individu yang terlibat dalam suatu proses sedemikian rupa sehingga mereka selalu waspada akan timbulnya suatu permasalahan. Pengawasan detektif harus menunjukkan kemungkinan permasalahan yang harus diperhatikan individu-individu sehingga tindakan dapat dilakukan.

Salah satu contoh pengawasan detektif adalah suatu daftar cek pembayaran dari mereka yang bekerja. Pengawasan detektif tidak akan mencegah permasalahan sebelum timbul, tetapi cenderung menunjukkan suatu permasalahan bila permasalahan itu timbul.

Menurut Revrisond (dalam Uci, 2012) pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilakukan setelah dilakukannya kegiatan, yaitu dengan membandingkan antara hal yang terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi. Pengawasan detektif dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan caranya, pengawasan detektif dibedakan atas dua bagian, yaitu: pengawasan dari jauh dan pengawasan dari dekat.

Penganggaran Berbasis Kinerja

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan pendapatan pada masa yang akan datang umumnya disusun untuk masa satu tahun. Anggaran juga berfungsi sebagai alat kontrol atau pengawasan, baik terhadap pendapatan maupun pengeluaran pada masa yang akan datang. Anggaran adalah suatu pendekatan formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan (Haruman dan Rahayu, 2007: 3). Dari ketiga definisi ini dapat diambil beberapa kata kunci,

yaitu anggaran merupakan suatu rencana yang sistematis, anggaran dinyatakan dalam unit moneter tertentu, anggaran bersifat formal, dan anggaran memiliki dimensi waktu, biasanya 1 tahun. Anggaran merupakan rencana tindakan manajerial untuk mencapai tujuan organisasi.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis Pengaruh Pengawasan Melekat terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran

Zulkifli (dalam Arif, 2013) mengatakan pengawasan adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan dan melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terealisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengendalian dan pengawasan adalah sama, yaitu untuk mengontrol agar rencana yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan merupakan kegiatan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu pekerjaan telah dilakukan sesuai menurut rencana. Pengawasan keuangan negara adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan negara, dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan di dalam anggaran.

Pihak yang paling bertanggung jawab atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan rencana adalah pihak atasan, maka pengawasan sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan

pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi pengawasan melekat merupakan suatu tindakan yang menjadi bagian dari aspek pengendalian, apabila pengawasan melekat telah tercapai sesuai yang diharapkan maka akan mendukung terlaksananya pengendalian anggaran yang efektif.

H1: Diduga pengawasan melekat berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran

Pengawasan atau penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaran pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengatakan bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik berasal dari lingkungan internal, maupun dari lingkungan eksternal pemerintahan. Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah dilakukannya pengawasan melekat oleh atasan langsung maka untuk mendukung keberhasilannya itu diperlukan pengawasan fungsional sebagai penunjang, agar pengawasan melekat dapat berfungsi secara efektif. Pengawasan fungsional ini juga mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan oleh BPKP, IRJEN, dan APLP.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Di antara fungsi-fungsi pengawasan itu termasuk didalamnya tentang pengawasan terhadap pengendalian anggaran. Jadi pengawasan fungsional merupakan salah satu aspek yang mendukung untuk terlaksananya pengendalian anggaran yang efektif. Semakin baik pengawasan fungsional pada suatu daerah maka pengendalian anggarannya semakin efektif.

H2: Diduga pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Pengaruh Pengawasan Preventif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan negara. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Widjaja (dalam Uci, 2012) mengatakan pengawasan preventif pada

umumnya tidak dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang telah ditetapkan. Pengawasan preventif ini biasa berbentuk prosedur-prosedur yang harus di tempuh dalam melaksanakan kegiatan.

Dari penjelasan di atas maka hubungan antara pengawasan preventif dengan efektivitas anggaran saling mengikat, pengawasan preventif menurut teori merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung, dan pengawasan ini dapat dijadikan sebagai pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap anggaran, dan mencegah tidak tercapainya anggaran sesuai dengan yang ditetapkan, sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat diawasi penggunaannya sesuai dengan peruntungannya, dan tidak terjadi lagi dana-dana yang terbuang, dan tidak terserap secara penuh. Jadi pengawasan preventif sangat berhubungan signifikan terhadap efektifnya suatu anggaran. Semakin bagus pengawasan preventif yang dilakukan maka semakin bagus pula pengendalian anggaran tersebut dalam menjalankan fungsi anggaran selama satu periode anggaran yang telah ditentukan.

H3: Diduga pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Pengaruh Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran

Pengawasan yang dilakukan di tempat berlangsungnya pekerjaan atau di tempat diselenggarakannya kegiatan administrasi. Pemeriksaan dalam hal ini tidak hanya dilakukan terhadap bukti-bukti penerimaan atau

bukti pengeluaran, tetapi dilanjutkan terhadap akurasi bukti-bukti tersebut secara material. Kelemahan utama dari pengawasan ini adalah kemungkinan kolusi antara aparat pengawasan dengan pihak yang sedang diawasi. Hal ini dimungkinkan karena sebelum melaksanakan tugas, biasanya petugas pemeriksa terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mengenai waktu pengawasan, kepada instansi yang akan diperiksanya. Sehingga instansi yang akan diperiksa dapat menyiapkan diri terlebih dahulu dengan menertibkan administrasi keuangan. Selanjutnya Revrisond (dalam Arif, 2013) mengatakan bahwa pengawasan sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan.

Pengawasan detektif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban, yang biasanya dilaksanakan setelah dilakukan suatu kegiatan. Pengawasan detektif dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah ditentukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi, pengawasan detektif merupakan salah satu aspek yang mendukung untuk terlaksananya pengendalian yang efektif. Apabila pengawasan detektif suatu daerah berjalan dengan baik, maka akan tercapainya pengendalian anggaran yang efektif.

H4: Diduga pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran

Menurut Darise (2008:146), penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut. Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada 'output' organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Performance budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti berorientasi pada kepentingan publik. Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well).

Pengertian efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Oleh karena

itu, penganggaran berbasis kinerja yang dalam penyusunan anggarannya didasarkan pada kejelasan target kinerja seharusnya dapat digunakan sebagai alat pengendalian anggaran. Jadi, semakin baik kinerja yang telah dilakukan pada suatu daerah, maka akan semakin mudah tercapainya pengendalian anggaran yang efektif.

H5: Diduga penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

METODE PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini dilakukan terhadap pegawai yang bekerja pada SKPD Kabupaten Indragiri Hilir. Pensampelan atas responden dilakukan secara purposive. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 64 responden. Penelitian ini menggunakan data primer dengan instrument yang menggunakan kuesioner kepada SKPD.

Metode Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2012).

Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau ketepatan suatu instrument, sebuah instrument

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya (Sugiyono, 2012).

Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal. Salah satu cara melihat normalitas yaitu dengan histogram, yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *Tolerance*. Jika $VIF > 10$ dan nilai $Tolerance < 0,10$ maka terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2013:106).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian ini digunakan untuk menguji adanya kesamaan dengan pengamatan penelitian sebelumnya. Pengujian ini dilakukan pada data primer dalam penelitian.

Analisis Regresi Berganda

Model regresi linier berganda adalah model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Model regresi linier berganda dilakukan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi. Penelitian ini menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi linier berganda yaitu :

$$Y^{\wedge} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Dimana:

Y= Efektifitas Pengendalian Anggran
 a= Konstanta
 b₁= Koefisien Regresi Pengawasan Melekat

b₂= Koefisien Regresi Pengawasan Fungsional
 b₃= Koefisien Regresi Pengawasan Preventif
 b₄= Koefisien Regresi Pengawasan Detektif
 b₅= Koefisien Regresi Penganggaran Berbasis Kinerja
 X₁= Pengawasan Melekat
 X₂= Pengawasan Fungsional
 X₃= Pengawasan Preventif
 X₄= Pengawasan Detektif
 X₅= Penganggaran Berbasis Kinerja
 e= Kesalahan (error)/ tingkat pengganggu

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) dan Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian hipotesis secara parsial digunakan Uji t. Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, dan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki hubungan signifikan/tidak dengan variabel terikat secara individual untuk setiap variabel. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian dengan kuesioner dan penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Reabilitas Data

Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 1 berikut ini. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah jawaban responden konsisten atau tidak dengan menggunakan uji SPSS dalam menjawab setiap pernyataan.

Tabel 1
Hasil Uji Realibilitas Data

NO	Variabel Penelitian	Nilai Cronbach's Alpha
1	Efektifitas Pengendalian Anggaran (Y)	0,692
2	Pengawasan Melekat (X ₁)	0,692
3	Pengawasan Fungsional (X ₂)	0,675
4	Pengawasan Preventif (X ₃)	0,779
5	Pengawasan Detektif (X ₄)	0,726
6	Penganggaran Berbasis Kinerja (X ₅)	0,800

Sumber : Data Olahan, 2016

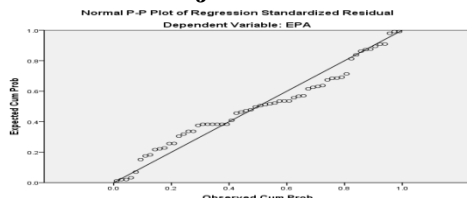
Hasil Uji Normalitas

Pada grafik normal *P-P Plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas (Ghozali 2013:163).

Didalam penelitian ini disajikan dalam graifk P-Plot. Dimana dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2013)

yaitu:

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data Olahan, 2016

Hasil Uji Multikolinieritas

Pada penelitian ini, nilai tolerance yang dihasilkan dalam penelitian ini berada diantara 0.1-1.0, dan nilai VIF diantara 1.0-10. Dengan demikian dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi multikolinieritas.

Nilai dari *tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* <0,10 atau nilai VIF > 10.

Nilai yang disajikan dalam uji multikolonieritas digunakan untuk melihat apaah masing-masing vaiabel independen memiliki kesamaan dengan variabel independen lainnya dan menghindari adanya kesamaan atas kesalahan peenggangu yang terjadi untuk masing-masing variabel independen untuk terbebas dari mutikolonieritas didalam penelitian.

Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
X1	0,908	1,714
X2	0,920	1,129
X3	0,998	1,253
X4	0,935	1,366
X5	0,909	1,234

Sumber : Data Olahan, 2016

Hasil Uji Heterokedastisitas

Pada penelitian ini, terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada

sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas. Apabila titik didalam gambar tersebar secara merata dibawah dan diatas nol, menggambar maksud dan tujuan dari penelitian.

Gambar 2
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : *Data Olahan, 2016*

Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi linear berganda dari model penelitian menjadi sebagai berikut dengan menggunakan analisis variabel dalam penelitian untuk mengukur peengaruh atau tidaknya:

$$EPA = 0,330 - 0,454X_1 + 0,329X_2 + 0,168X_3 + 0,445X_4 + 0,322X_5 + e$$

Arti angka-angka dalam persamaan regresi diatas:

- Nilai konstanta (α) sebesar 0,330. Artinya adalah apabila variabel pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja diasumsikan nol (0), maka efektifitas pengendalian anggaran sebesar 0,330.
- Nilai koefisien regresi pengawasan melekat sebesar - 0,454. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan pengawasan melekat sebesar 1 satuan maka akan menurunkan efektifitas pengendalian anggaran sebesar

- 0,454.
- Nilai koefisien regresi pengawasan fungsional sebesar 0,329. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan pengawasan fungsional sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan efektifitas pengendalian anggaran sebesar 0,329.
- Nilai koefisien regresi pengawasan preventif sebesar 0,168. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan pengawasan preventif sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan efektifitas pengendalian anggaran sebesar 0,168.
- Nilai koefisien regresi pengawasan detektif sebesar 0,445. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan pengawasan detektif sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan efektifitas pengendalian anggaran sebesar 0,445.
- Nilai koefisien regresi penganggaran berbasis kinerja sebesar 0,322. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan penganggaran berbasis kinerja sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan efektifitas pengendalian anggaran sebesar 0,322.

Hasil Pengujian Hipotesis H₁

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.12 didapat nilai t_{hitung} senilai - 2,219. Nilai t tabel sebesar 2,004, diperoleh dari tabel statistik, dengan melihat nilai signifikansi 5% dan nilai df sebesar 60 (n-banyaknya variable independen) (Ghozali, 2013:79). Dengan demikian diketahui $t_{hitung} -2,219 > t_{tabel} 2,004$. Maka dapat disimpulkan **H₁ diterima** yaitu pengawasan melekat

berpengaruh negatif terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Sementara itu, dalam tabel 4.12 didapat P value 0,001 yang berarti P value $0,001 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa pengawasan melekat berpengaruh negatif signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Hasil Pengujian Hipotesis H₂

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.12 didapat nilai t_{hitung} senilai 2,465. Nilai t tabel sebesar 2,004, diperoleh dari tabel statistik, dengan melihat nilai signifikansi 5% dan nilai df sebesar 60 (n-banyaknya variable independen) (Ghozali, 2013:79). Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 2,465 > t_{tabel} 2,004$. Maka dapat disimpulkan **H₂ diterima** yaitu pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Sementara itu, dalam tabel 4.12 didapat P value 0,019 yang berarti P value $0,019 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Hasil Pengujian Hipotesis H₃

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.12 didapat nilai t_{hitung} senilai 2,461. Nilai t tabel sebesar 2,004, diperoleh dari tabel statistik, dengan melihat nilai signifikansi 5% dan nilai df sebesar 60 (n-banyaknya variable independen) (Ghozali, 2013:79). Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 2,461 > t_{tabel} 2,004$. Maka dapat disimpulkan **H₃ diterima** yaitu pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Sementara

itu, dalam tabel 4.12 didapat P value 0,017 yang berarti P value $0,017 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa pengawasan preventif berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Hasil Pengujian Hipotesis H₄

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.12 didapat nilai t_{hitung} senilai 2,538. Nilai t tabel sebesar 2,004, diperoleh dari tabel statistik, dengan melihat nilai signifikansi 5% dan nilai df sebesar 60 (n-banyaknya variable independen) (Ghozali, 2013:79). Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 2,538 > t_{tabel} 2,004$. Maka dapat disimpulkan **H₄ diterima** yaitu pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Sementara itu, dalam tabel 4.12 didapat P value 0,014 yang berarti P value $0,014 < 0,05$. Berdasarkan hitungan tersebut, diketahui bahwa pengawasan detektif berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Hasil Pengujian Hipotesis H₅

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.12 didapat nilai t_{hitung} senilai 1,882. Nilai t tabel sebesar 2,004, diperoleh dari tabel statistik, dengan melihat nilai signifikansi 5% dan nilai df sebesar 60 (n-banyaknya variable independen) (Ghozali, 2013:79). Dengan demikian diketahui $t_{hitung} 1,882 < t_{tabel} 2,004$. Maka dapat disimpulkan **H₅ ditolak** yaitu penganggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Sementara itu, dalam tabel 4.12 didapat P value 0,065 yang berarti P value $0,065 < 0,05$. Berdasarkan

hitungan tersebut, diketahui bahwa penganggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan pengawasan melekat berpengaruh negatif terhadap efektifitas pengendalian anggaran.
- 2) Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.
- 3) Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.
- 4) Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.
- 5) Hasil uji hipotesis kelima menunjukkan penganggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Saran

Atas dasar kesimpulan di atas, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Pada penelitian selanjutnya diharapkan area penelitian dapat diperluas, tidak hanya pada satu SKPD, namun dapat menambahkan SKPD lainnya yang berada di Provinsi Riau,

sehingga lebih dapat digeneralisasikan.

- 2) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lainnya yang memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.
- 3) Ketika membagikan kuesioner kepada responden, sebaiknya peneliti memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan diisi, misalnya dengan cara peneliti memberikan penjelasan secara langsung ataupun menghubungi melalui telepon kepada responden, agar data yang diperoleh nantinya tidak bias dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penelitian agar responden dalam penelitian mampu memahami isi dan pernyataan kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Austin, Uci. 2012. *Pengaruh Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional, Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pekanbaru*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Darise. 2008. *Manajemen Pengendalian Internal*. Penerbit: Swadaya Karya. Jakarta
- Fuadi, Arif. 2013. *Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif Terhadap Efektifitas*

- Pengendalian Anggaran* (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Di Kabupaten Bukittinggi).
- Ghozali. 2013. *Pedoman SPSS*. Penerbit Swadaya. Jakarta.
- Haruman Tendi dan Sri Rahayu. 2007 . *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Edisi kedua. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Indra, Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: BPF.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Sopannah.2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. SNA VI
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Yogyakarta.